

LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran

2018

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Alamat : Jln. Abdurrahman Wahid No. 104, Wonosobo

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai OPD adalah salah satu entitas Pelaporan dibawah Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Disamping itu, laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Wonosobo, 15 Februari 2019

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Drs. One Andang Wardoyo, M.Si.

NIP. 19680925 198803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah berstruktur pada suatu periode pelaporan.

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi keuangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

1.1.2. Tujuan

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntabilitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan;
- Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber ekonomi;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

- i. Laporan Realisasi Anggaran
- ii. Neraca
- iii. Laporan Operasional
- iv. Laporan Perubahan Ekuitas

1.2. Landasan Hukum

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal – hal berikut ini apabila belum diungkapkan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keugian Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kab. Wonosobo ;
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 ;
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019 ;
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 ;
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 ; dan
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 disusun agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang – kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab. III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

- 3.1.1. Pendapatan LRA
- 3.1.2. Belanja LRA

3.2. Neraca

- 3.2.1. Aset
- 3.2.2. Kewajiban
- 3.2.3. Ekuitas

3.3. Laporan Operasional

- 3.3.1. Pendapatan LO
- 3.3.2. Beban LO
- 3.3.3. Surplus / Defisit

3.4. Laporan Perubahan ekuitas

Bab. IV Penutup

BAB II
IKHTIAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ringkasan Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2018

Selama periode berjalan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengadakan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) dari DPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN	3.828.929,000	4.994.074.600	130,43
Pendapatan Asli Daerah	3.828.929,000	4.994.074.600	130,43
Pendapatan Retribusi Daerah	3.773.000,000	4.984.544.800	132,11
Lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang Sah	55.929,000	9.529.800	17,04
BELANJA	27.998.787,196	25.515.033.006	91,13
Belanja Operasi	12.095.651,196	9.820.825.430	81,19
Belanja Modal	15.903.136,000	15.694.207.576	98,69
SURPLUS/(DEFISIT)	(24.169.858,196)	(20.520.958.406)	84,90
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.169.858,196)	(20.520.958.406)	84,90

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Pendapatan Tahun Anggaran 2018 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.994.074.600,00 atau 130,4 3% dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.828.929.000,00 sudah melebihi target anggaran sebesar Rp. 1.165.145.600,00.
2. Belanja Tahun Anggaran 2018 dapat terealisasi sebesar Rp. 25.515.033.006,00 atau 91,13 % dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 27.998.787.196,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp. 2.483.754.190,00.
3. Surplus anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 3.648.899.790,00.
4. SILPA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 mencapai Rp. 20.520.958.406,00 turun sebesar Rp. 3.648.899.790,00 dari anggaran sebesar Rp. 24.169.858.196,00.

2.2 Realisasi TA 2018 Dibandingkan Dengan Realisasi TA 2017

URAIAN	Realisasi TA 2018	REALISASI TA 2017	Naik/(Turun)	%
Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	4.994.074.600,00	3.833.629.800,00	1.160.444.800,00	30,27
Belanja	25.515.033.006,00	11.259.219.435,00	14.255.813.571,00	126,61
Surplus/(Defisit)	(20.520.958.406,00)	(7.425.589.635,00)	(13.095.368.771,00)	176,35
Pembiayaan	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-	-
SILPA	(20.520.958.406,00)	(7.425.589.635,00)	(13.095.368.771,00)	176,35

Perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2018 dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- 2.2.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.994.074.600,00 sedangkan Tahun Anggaran 2017 sebesar 3.833.629.800,00. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ada kenaikan realisasi pendapatan TA. 2018 sebesar 30,27% dibandingkan TA. 2017.
- 2.2.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan dari Rp. 25.515.033.006,00 pada Tahun 2017 menjadi Rp. 11.259.219.435,00, atau mengalami kenaikan 176,35.
- 2.2.3 SILPA Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar 176,35% dibandingkan SILPA Tahun 2017.

2.3 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi

2.3.1 Hambatan dalam pencapaian target Pendapatan.

Secara umum kondisi Pendapatan Daerah sangat dipengaruhi oleh factor eksternal dan internal. Factor eksternal antara lain kondisi politik, ekonomi, dan social budaya, ketertiban, dan keamanan, sedangkan factor internal sangat tergantung pada kemampuan menentukan arisan dan kebijakan unit pengelola pendapatan. Factor eksternal dan internal tidak hanya mempengaruhi kondisi umum pendapatan Daerah.

Adapun permasalahan utama pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adalah :

- 2.3.1.1 Kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang penarikan retribusi;
- 2.3.1.2 Peran serta masyarakat dalam upaya ikut serta mendukung Sapta Pesona di daerah masih rendah;
- 2.3.1.3 Belum ada pembaharuan beberapa peraturan daerah tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga, desa wisata, dan usaha pariwisata; dan
- 2.3.1.4 Kesadaran legalitas usaha pariwisata masih perlu ditingkatkan.

2.3.2 Hambatan dalam pencapaian target Belanja

Hambatan dalam pencapaian target Belanja antara lain :

- 2.3.2.1 Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang manajemen pariwisata, bahasa asing, perhotelan, teknik arsitektur, dan akuntansi, serta bidang lainnya;
- 2.3.2.2 Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang keluarannya diPerubahan Anggaran;
- 2.3.2.3 Kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik; dan
- 2.3.2.4 Sistem Pengawasan dari BPK, BPKP, dll. dianggap sebagai penyebab terhambatnya proses tender pengadaan, misalnya pejabat ada yang enggan ditunjuk menjadi pemimpin proyek atau panitia pengadaan karena takut akan resiko dan ketidakpastian regulasi.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

3.1.1. Pendapatan LRA

Pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, berupa :

3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

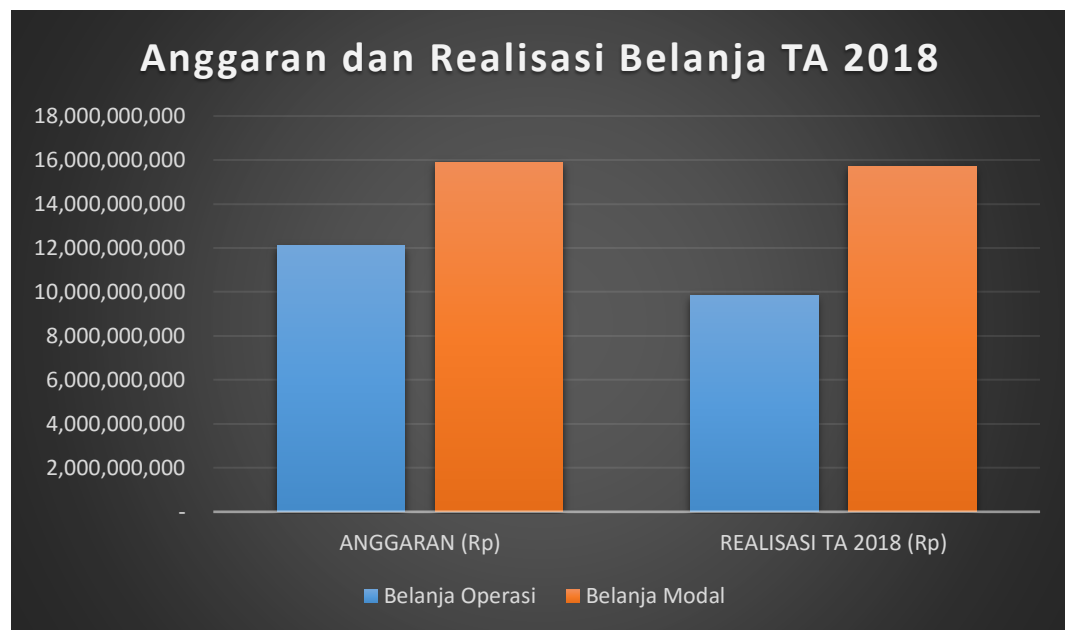
Realisasi retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 4.984.544.800,00. Adapun retribusi Daerah hanya berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

3.1.1.2. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 9.529.800,00 berasal dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang sah.

3.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer. Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA. 2018 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :



Secara garis besar, anggaran dan realisasi belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA. 2018 serta realisasi TA. 2017 disajikan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TA 2018 (Rp)	REALISASI TA 2017 (Rp)	%
Belanja Operasi	12.095.651.196	9.820.825.430.00	8.770.653.435	81,19
Belanja Modal	15.903.136.000	15.694.207.576	2.488.566.000	98,69
Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
Transfer	-	-	-	-
Jumlah	27.998.787.196	25.515.033.006	11.259.219.435	91,13

Realisasi Belanja TA. 2018 sebesar Rp. 25.515.033.006,00 dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 27.998.787.196,00. Bila dibandingkan dengan TA. 2017,

realisasi belanja TA. 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.259.219.435,00 atau sebesar 91,13 %. Hal ini disebabkan oleh :

1. Meningkatnya belanja pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Meningkatnya belanja barang dan jasa di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
3. Meningkatnya belanja modal di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Berikut uraian lebih lanjut realisasi belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA. 2018 :

3.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi TA. 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.820.825.430,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 12.095.651.196,00. Anggaran dan realisasi belanja operasi TA. 2018 serta TA. 2017 sebagai berikut :

BELANJA OPERASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TA 2018 (Rp)	REALISASI TA 2017 (Rp)	%
Belanja Pegawai	4.598.610.078	4.064.787.469	3.809.977.007	88,39
Belanja Barang	4.868.041.118	4.692.102.961	4.283.529.828	96,39
Belanja Hibah	2.520.000.000	954.935.000	327.696.600	37,89
Belanja Bantuan Sosial	109.000.000	109.000.000	349.450.000	100,00
Jumlah	12.095.651.196	9.820.825.430	8.770.653.435	81,19

Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 254.810.462,00 atau 2,91%.

3.1.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Tahun Anggaran 2018 dapat terealisasi sebesar Rp. 15.694.207.576,00 atau mencapai 0,01% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 15.903.136.000,00.

BELANJA MODAL	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TA 2018 (Rp)	REALISASI TA 2017 (Rp)
Belanja Tanah	3.000.000.000	2.892.437.048	-
Belanja Peralatan dan Mesin	469.600.000	434.504.500	12.870.000
Belanja Bangunan dan Gedung		12.367.266.028	2.182.568.000
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	293.128.000
Jumlah	15.903.136.000	15.694.207.576	2.488.566.000

3.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. Rp. 2.892.437.048,00. Dibandingkan Tahun Anggaran 2017 yang tidak ada realisasi anggaran, karena tidak terdapat anggaran belanja modal tanah. Belanja tanah seluas 1.800 m² berada di Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo bersebelahan dengan Daya Tarik Wisata (DTW) Taman Rekreasi Kalianget.

3.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 434.504.500,00. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 421.634.500,00 atau kenaikan mencapai 96,1 %. Adapun belanja peralatan dan mesin berupa parasut paralayang dan alat pemutar 4 (empat) dimensi/4D.

3.1.2.2.3. Belanja Bangunan dan Gedung

Realisasi belanja bangunan dan Gedung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.367.266.028,00 atau mencapai 566,64 % dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan 99,47 % realisasi dari anggaran sebesar Rp. 12.433.536.000,00.

Belanja bangunan dan Gedung tersebut berupa pembangunan Tuk Bimolukar, Gedung Syailendra, dan Daya Tarik Wisata (DTW) Taman Rekreasi Kalianget.

3.2. Neraca

Neraca Tahun Anggaran 2018 per 31 Desember 2018 menunjukkan posisi Aset sebesar Rp. 40.399.148.425,50, Kewajiban sebesar Rp. 9.224.790,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 40.389.923.635,50 sebagaimana tabel berikut :

URAIAN	TA 2018	TA 2017	LEBIH/KURANG (%)
Aset	40.399.148.425,50	25.693.103.553,40	57,24
Kewajiban	9.224.790,00	3.026.308,00	204,82
Ekuitas	40.389.923.635,50	25.690.077.245,40	57,22
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	40.399.148.425,50	25.693.103.553,40	57,24

3.2.1. Aset

Asset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 41.296.996.029,40 dengan penjelasan masing-masing akun sebagai berikut :

3.2.1.1. Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 34.637.383,00 terdiri atas :

1. Kas di Bendahara Penerima	Rp.	951.700,00
2. Piutang Pendapatan	Rp.	15.360.000,00
3. Persediaan	Rp.	18.325.683,00
Jumlah	Rp.	34.637.383,00

Aset lancar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya terdiri dari kas di bendahara penerima, piutang pendapatan, dan persediaan, sedangkan untuk kas di bendahara pengeluaran, setara kas, investasi jangka pendek, piutang lainnya, penyisihan piutang, dan beban dibayar dimuka tidak ada aset lancar-nya. Berikut penjelasan dari 3 rincian tersebut diatas :

1. Kas di Bendahara Penerima

Saldo Kas di Bendahara Penerima per Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp.951.700,00 dan Rp. 91.266.800,00. Kas tersebut meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerima yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Daerah.

2. Piutang Pendapatan

Saldo piutang pendapatan per Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.360.000,00 dan Rp. 17.728.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 2.368.000,00 atau 15,42 %. Piutang pendapatan merupakan hak tau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian piutang retribusi sebagai berikut

a. Tempat khusus parkir sebesar	Rp.	4.200.000,00
b. Tempat rekreasi dan olah raga sebesar	<u>Rp.</u>	<u>11.160.000,00</u>

Jumlah **Rp. 15.360.000,00**

3. Persediaan

Nilai persediaan per Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 18.325.683,00 dan Rp. 10.955.445,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.370.238,00 atau sebesar 67,27 % dari Tahun 2017.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per Tanggal 31 Desember 2018 adalah persediaan bahan pakai habis Rp. 18.325.683,00 yang terdiri dari persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 67.500,00 dan persediaan cetak dan penggandaan sebesar Rp. 18.258.183,00.

3.2.1.2. Aset Tetap

Asset Tetap per 31 Desember 2018 senilai Rp. 40.335.675.362,00 merupakan aset tetap yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan saldo akhir Tahun 2017 sebesar 25.581.592.799,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 14.754.082.563,00 atau 57,67 % dari Tahun 2017. Adapun rincian aset tetap selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

URAIAN	TA 2018	TA 2017	LEBIH/KURANG (%)
Tanah	12.290,648.383,00	9.398.211.335,00	30,78
Peralatan dan Mesin	1.865,112.315,00	1.735.315.339,00	7,48
Gedung dan Bangunan	25.964,686.153,00	14.120.832.896,00	83,88
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	2.752,875.191,00	2.752.875.191,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	596.236.988,00	516.785.240,00	15,37
Konstruksi dalam Pengerjaan	500.484.771,00	291.956.000,00	71,42
Akumulasi Penyusutan	(3.634.368,439,00)	(3.234.383.202,00)	12,37
Jumlah	40.335.675,362,00	25.581.592.799,00	57,67

Adapun penjelasan mutase penambahan dan pengurangan aset tetap sebagai berikut :

3.2.1.2.1. Tanah

Uraian	Saldo Awal 2017	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2018
		D	K	D	K	
Tanah untuk Bangunan Gedung	8.493.285.865,00	-	-	2.892.437.048,00	-	11,385,722,913.00
Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	904.925.470,00	-	-	-	-	904,925,470.00
Jumlah	9.398.211.335,00	-	-	2.892.437.048,00	-	12,290,648,383.00

Mutasi debet sebesar Rp. 2.892.437.048,00 berasal dari pengadaan belanja modal Tahun Anggaran 2018 berupa pembelian tanah seluas 1.800 m² berada di Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo bersebelahan dengan Daya Tarik Wisata (DTW) Taman Rekreasi Kalianget. Pada Tahun Anggaran 2018 tidak ada pengurangan aset baik mutase atau koreksi kredit.

3.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki dinas Pariwisata dan Kebudayaan per Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 1.865.112.315,00 dan Rp. 1.735.315.339,00. Aset tersebut naik sebesar Rp. 129.796.976,00 atau 7,48 % dari Tahun 2017.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2017	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2018
		D	K	D	K	
Alat-alat Bantu	-	5.000.000,00	5000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	640.844.804,00	-	-	-	75.208.000,00	565.636.804,00
Alat Angkut Udara	-	-	67.045.000,00	67.045.000,00	-	-
Alat Ukur	12.283.700,00	-	-	-	-	12.283.700,00
Alat Kantor	379.721.850,00	6.400.000,00	51.280.910,00	58.846.000,00	-	393.686.940,00
Alat Rumah Tangga	296.629.537,00	82.606.455,00	-	-	-	379.235.992,00
Komputer	196.968.672,00	41.059.789,00	14.054.789,00	60.342.000,00	-	284.315.672,00
Meja dan Kursi Rapat/Kerja Pejabat	31.935.000,00	-	12.958.750,00	33.337.500,00	-	52.313.750,00
Alat Studio	32.778.000,00	103.259.828,00	151.595.000,00	151.595.000,00	-	136.037.828,00
Alat Komunikasi	3.414.000,00	2.920.000,00	8.318.000,00	8.318.000,00	-	6.334.000,00
Alat Keamanan & Perlindungan	-	-	19.753.371,00	50.021.000,00	-	30.267.629,00
Jumlah	1.594.575.563,00	241.246.072,00	330.005.820,00	434.504.500,00	75.208.000,00	1.865.112.315,00

Penjelasan Mutasi :

1. Alat-Alat Bantu
Nilai aset tetap berupa alat-alat bantu per Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00 sedangkan pada saldo awal tidak ada aset. Tahun 2018 terjadi penambahan aset dengan mutasi debit sebesar Rp. 5.000.000,00.
2. Alat Angkutan Darat Bermotor
Saldo aset tetap berupa alat angkutan darat bermotor per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 565.636.804,00 dan Rp. 640.844.804,00. Mutasi kredit sebesar Rp. 75.208.000,00 berupa mutase Mobil Kijang (stasiun wagon) plat AA 132 F ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
3. Alat Angkut Udara
Nilai aset tetap berupa alat angkut udara berupa parasut paralayang sebesar Rp. 67.045.000,00 berupa hibah/bantuan kepada komunitas paralayang.
4. Alat Ukur
Nilai aset tetap berupa alat ukur per 31 Desember 2018 dan 2017 tidak mengalami kenaikan/penurunan yaitu sebesar Rp. 12.283.700,00. Adapun alat ukur dimaksud berupa Jangka Sorong (Rp. 1.600.000,00), GPS (Rp. 3.099.800,00), Digital Meter (Rp. 3.000.800,00), dan Alat Timbang Digital (Rp. 4.582.600,00).
5. Alat Kantor
Nilai aset tetap berupa alat kantor per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp. 393.686.940,00 dan Rp. 379.721.850,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 13.965.090,00 atau 3,6 % dari Tahun 2017. Mutasi debit sebesar Rp. 13.965.090,00 adalah hasil pengadaan barang Tahun 2018.
6. Alat-Alat Rumah Tangga
Nilai aset tetap berupa alat-alat rumah tangga per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 379.235.992,00 dan Rp. 296.629.537,00.

7. Komputer

Nilai aset berupa alat komputer per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 284.315.672,00 dan Rp. 196.968.672,00. Mutasi debet sebesar Rp. 87.347.000,00.

8. Meja dan Kursi Rapat Pejabat

Nilai aset tetap berupa meja dan kursi/rapat pejabat per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 52.313.750,00 dan Rp. 31.935.000,00. Mengalami penambahan sebesar Rp. 20.378.750,00 atau 63,81 % dari Tahun 2017.

9. Alat Studio

Nilai aset tetap berupa alat studio per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp. 136.037.828,00 dan Rp. 32.778.000,00. Mutasi debet sebesar Rp. 151.595.000,00 dan terkoreksi debet sebesar Rp. 103.259.828,00 serta koreksi kredit Rp. 151.595.000,00.

10. Alat Komunikasi

Nilai aset tetap berupa alat komunikasi per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 6.334.000,00 dan Rp. 3.414.000,00. Adanya penambahan sebesar Rp. 2.920.000,00 atau 85,53 % dari Tahun 2017.

11. Alat Keamanan dan Perlindungan

Nilai aset tetap berupa alat keamanan dan perlindungan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 30.267.629,00 sedangkan pada Tahun 2017 tidak ada aset tersebut. Mutasi debet sebesar Rp. 50.021.000,00 terkoreksi kredit sebesar Rp. 19.753.371,00.

3.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 25.964.686.153,00 dan Rp. 14.120.832.896,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.843.853.257,00 atau sebesar 85,48 % dari Tahun 2017. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2017	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2018
		D	K	D	K	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.856.451.050,00	742.694.100,00	959.802.871,00	12.367.266.028,00	306.304.000,00	25.700.304.307,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	149.731.470,00	-	-	-	-	149.731.470,00
Tugu Peringatan	114.650.376,00	-	-	-	-	114.650.376,00
Jumlah	14.120.832.896,00	742.694.100,00	959.802.871,00	12.367.266.028,00	306.304.000,00	25.964.686.153,00

Penjelasan Mutasi :

1. Bangunan Gedung Tempat Kerja

Nilai aset tetap berupa bangunan gedung tempat kerja per 31 Desember 2018 dan 2016 adalah Rp. 25.700.304.307,00 dan Rp. 13.856.451.050,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.843.853.257,00 atau sebesar 85,48 % dari Tahun 2017. Mutasi debet sebesar Rp. 12.367.266.028,00 adalah hasil pengadaan barang Tahun 2018 dari belanja modal dan bangunan berupa Gedung tempat pertemuan. Mutase kredit Rp. 306.304.000,00 merupakan reklas pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya.

2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Nilai aset tetap berupa bangunan Gedung tempat tinggal per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 149.731.470,00 dan Rp. 149.731.470,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2017.

3. Tugu Peringatan

Nilai aset tetap berupa Tugu Peringatan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 114.650.376,00 dan Rp. 114.650.376,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2017.

3.2.1.2.4. Jalan, Jaringan, dan Instalasi

Nilai jalan, jaringan, dan instalasi per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 2.752.875.191,00 dan Rp. 2.752.875.191,00 tidak mengalami penambahan/pengurangan dari Tahun 2017. Mutasi transaksi terhadap jalan, jaringan, dan instalasi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2017	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2018
		D	K	D	K	
Jalan	1.536.268.060,00	-	-	-	-	1.536.268.060,00
Bangunan Air Irigasi	122.332.953,00	-	-	-	-	122.332.953,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	93.750.000,00	-	-	-	-	93.750.000,00
Bangunan Air Bersih/Baku	467.853.678,00	-	-	-	-	467.853.678,00
Instalasi Air Minum/Air Bersih	487.990.500,00	-	-	-	-	487.990.500,00
Jaringan Listrik	44.680.000,00	-	-	-	-	44.680.000,00
Jumlah	2.752.875.191,00	-	-	-	-	2.752.875.191,00

1. Jalan

Nilai aset tetap berupa jalan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 1.536.268.060,00 dan Rp. 1.536.268.060,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2017.

2. Bangunan Air irigasi

Nilai aset tetap berupa bangunan air irigasi per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 122.332.953,00 dan Rp. 122.332.953,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2017.

3. Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

Nilai aset tetap berupa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 93.750.000,00 dan Rp. 93.750.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2017.

4. Bangunan Air Bersih/Baku

Nilai aset tetap berupa bangunan air bersih/baku per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 467.853.678,00 dan Rp. 467.853.678,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2017.

5. Instalasi Air Minum/Air Bersih

Nilai aset tetap berupa instalasi air minum/air bersih per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 487.990.500,00 dan Rp. 487.990.500,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2017.

6. Jaringan Listrik

Nilai aset tetap berupa jaringan listrik per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 44.680.000,00 dan Rp. 44.680.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2017.

3.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 596.236.988,00 dan Rp. 516.785.240,00, mengalami penambahan sebesar Rp. 79.451.748,00 dari Tahun 2017. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2017	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2018
		D	K	D	K	
Buku	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00
Barang-Barang Perpustakaan	228.136.000,00	-	-	-	-	228.136.000,00
Barang Bercorak Kebudayaan	164.714.240,00	12.406.748,00	-	-	-	177.120.988,00
Alat Olahraga Lainnya	-	67.045.000,00	-	-	-	67.045.000,00
Aset Tetap Renovasi	98.935.000,00	-	-	-	-	98.935.000,00
Jumlah	516.785.240,00	79.451.748,00	-	-	-	596.236.988,00

Penjelasan mutasi :

1. Buku

Nilai aset tetap berupa buku per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 dan Rp. 25.000.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2017.

2. Barang-Barang Perpustakaan

Nilai aset tetap berupa barang-barang perpustakaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 228.136.000,00 dan Rp. 228.136.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2017.

3. Barang Bercorak Kebudayaan

Nilai aset tetap berupa barang bercorak kebudayaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 177.120.988,00 dan Rp. 164.714.240,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.406.748,00 atau 7,53 % dari Tahun 2017. Koreksi debit sebesar Rp. 12.406.748,00 adalah hasil pengadaan buku kebudayaan.

4. Alat Olahraga Lainnya

Nilai aset tetap berupa alat olahraga lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 67.045.000,00 sedangkan di Tahun 2017 tidak ada aset tetap berupa alat olahraga lainnya. Koreksi debit sebesar Rp. 67.045.000,00 adalah pengadaan parasut paralayang.

5. Aset Tetap Renovasi

Nilai aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 98.935.000,00 dan Rp. 98.935.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2017.

3.2.1.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 500.484.771,00 dan Rp. 291.956.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 208.528.771,00 atau 71,42 % dari Tahun 2017. Mutasi transaksi terhadap konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2017	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2018
		D	K	D	K	
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	291.956.000,00	305.176.877,00	966.48.106,00	-	-	500.484.771,00
Jumlah	291.956.000,00	305.176.877,00	96.648.106,00	-	-	500.484.771,00

Konstruksi dalam pengerjaan bangunan Gedung tempat kerja berupa Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor.

3.2.1.2.7. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. -3.634.368.439,00 dan Rp. -3.234.383.202,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 399.985.237,00 atau 12,37 % dari Tahun 2017. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Mutasi transaksi terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2017	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2018
		D	K	D	K	
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(1.146.887.745,00)	-	-	75.208.000,00	194.044.109,00	(1.265.723.854,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.360.245.202,00)	-	-	45.266.987,00	252.252.478,00	(1.567.230.693,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(613.135.735)	-	-	-	188.278.157,00	(801.413.892,00)
Jumlah	(3.120.268.682,00)	-	-	120.474.987,00	634.574.744,00	(3.634.368.439,00)

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan

Akumulasi penyusutan peralatan berupa penyusutan alat angkutan darat bermotor alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, computer, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, alat studio, dan alat komunikasi.

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan berupa bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, dan tugu peringatan.

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan, bangunan air irigasi, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, bangunan air bersih/baku, dan instalasi air minum/air bersih.

3.2.1.3. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 28.835.680,50 dan Rp. 2.652,509,40 mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.183.171,10 atau 987,11 % dari Tahun 2017. Mutasi transaksi terhadap aset lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2017	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2018
		D	K	D	K	
Aset Tak Berwujud	2.652.509,40	0	0	0	442.084,90	2.210.424,50
Aset Lain-lain	26.625.256,00	0	0	0	-	26.625.256,00
Jumlah	29.277.765,40	0	0	0	442.084,90	28.835.680,50

3.2.1.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 2.210.424,50 dan Rp. 2.652.509,40 mengalami penurunan sebesar Rp. -442.084,90 atau -16,67 % dari Tahun 2017.

Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Adapun aset tak berwujud tersebut adalah *software* dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud lainnya.

3.2.1.3.2. Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 26.626.256,00 dan Rp. 26.626.256,00, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

3.2.2. Kewajiban

Saldo kewajiban per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 9.224.790,00 dan Rp. 3.026.308,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.198.482,00 atau 204,82 % dari Tahun 2017. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya memiliki kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka Panjang tidak ada. Adapun kewajiban jangka pendek pada tanggal pelaporan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2017	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2018
		D	K	D	K	
Pendapatan Diterima Dimuka	256.000,00	-	-	256.000,00	-	0,00
Utang Beban	2.770.308,00	-	-	2.770.308,00	9.224.790,00	9.224.790,00
Jumlah	3.026.308,00	-	-	3.026.308,00	9.224.790,00	9.224.790,00

3.2.2.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pendapatan diterima dimuka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengalami mutase debit sebesar Rp. 256.000,00 dan tidak ada muasi kredit sehingga saldo akhir 2018 tidak ada (nol) sedangkan saldo akhir 2017 Rp. 256.000,00.

3.2.2.2. Utang Beban

Utang merupakan kewajiban yang harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak piutang atau pemberi utang dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Utang beban dimaksud berupa utang barang dan jasa. Nilai utang beban per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 9.224.790,00 dan Rp. 2.770.308,00, mengalami kenaikan utang sebesar Rp. 6.454.482,00. Adanya penambahan (mutase kredit) sebesar Rp. 9.224.790,00 dan pengurangan (mutasi debit) sebesar Rp. 2.770.308,00.

3.2.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 40.389.923.635,50 dan Rp. 25.690.077.245,40 mengalami kenaikan sebesar Rp. 14.699.846.390,10 atau sebesar 57,22 % dari Tahun 2017. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/deficit operasional.

3.3.1. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang tidak perlu dibayar kembali Periode Tahun Anggaran 2018, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017 sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 4.995.306.600,00 dan Rp. 3.968.401.800,00. Dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.026.904.800,00 atau sebesar 25,88 %.

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	4.995.306.600,00	3.846.901.800,00	1.148.404.800,00	29,85
Pendapatan Transfer-LO	-	-	-	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	-	121.500.000,00	(121.500.000,00)	(100,00)
Jumlah	4.995.306.600,00	3.968.401.800,00	1.026.904.800,00	25.88

Realisasi masing-masing pendapatan-LO Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Periode Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dengan rincian jumlah PAD sebagai berikut :

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	4.982.976.800,00	3.846.901.800,00	1.136.075.000,00	29,53
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	0,00
lain-lain PAD Yang Sah	12.329.800,00	-	12.329.800,00	0,00
Jumlah	4.995.306.600,00	3.846.901.800,00	1.148.404.800,00	29,85

Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya bersumber dari pendapatan retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan retribusi Daerah berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga per 31 Desember 2018 dan 2017 yaitu sebesar Rp. 4.982.976.800,00 dan Rp. 3.846.901.800,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.136.075.000,00 atau 29,53 % dari Tahun 2017. Pendapatan lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 12.329.800,00 sedangkan pada Tahun 2017 tidak ada pendapatan. Pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil dari pemanfaatan kekayaan Daerah sistem sewa.

3.3.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak ada pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat lainnya, Pemerintah Daerah lainnya, maupun bantuan keuangan baik Tahun 2018 dan 2017.

3.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Akun ini menggambarkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Periode Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Pendapatan Hibah-LO	-	121.500.000,00	(121.500.000,00)	(100,00)
Dana Darurat-LO	-	-	-	0,00
Pendapatan Lainnya-LO	-	-	-	0,00
Jumlah	-	121.500.000,00	(121.500.000,00)	(100,00)

Pada pendapatan tersebut pada Tahun 2018 tidak ada pendapatan, berbeda dengan Tahun 2017 yang terdapat pendapatan berasal dari hibah sebesar Rp. 121.500.000,00.

3.3.2. Beban

Beban sesuai PSAP 12 adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Adapun realisasi beban Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 10.570.813.832,90 dan Rp. 8.857.875.677,90, mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.712.938.155,00 atau sebesar 19,34 % dari Tahun 2017.

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Pegawai-LO	3.862.558.469,00	3.631.406.243,00	231.152.226,00	6,37
Beban Persediaan	2.359.583.042,00	1.424.183.830,00	935.399.212,00	65,68
Beban Jasa	3.131.804.564,00	2.816.574.092,00	315.230.472,00	11,19
Beban Pemeliharaan	69.748.192,00	49.824.128,00	19.924.064,00	39,99
Beban Perjalanan Dinas	512.102.737,00	338.733.490,00	173.369.247,00	51,18
Beban Penyusutan dan Amortisasi	635.016.828,9	590.261.894,90	44.754.934,00	7,58
Beban Penyisihan Piutang	-	6.892.000,00	(68.920.000,00)	(100,00)
Jumlah	10.570.813.832,90	8.857.875.677,90	1712938.155,00	19,34

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 dan 2017 tidak memiliki Beban berupa beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban lain-lain, dan beban transfer bagi hasil pajak Daerah. Namun pada beban penyisihan piutang Tahun 2017 terdapat Rp. 6.892.000,00 sedangkan Tahun 2018 tidak ada beban tersebut.

3.3.2.1. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai pada Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp. 3.862.558.469,00 dan Rp. 3.631.406.243,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 231.152.226,00 atau sebesar 6,37 % dari Tahun 2017.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian Beban Pegawai	Jumlah (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan		2.304.187.569,00
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.774.703.000,00
2	Tunjangan Keluarga	201.993.834,00
3	Tunjangan Jabatan	142.590.000,00
4	Tunjangan Fungsional	-
5	Tunjangan Fungsional Umum	69.205.000,00
6	Tunjangan Beras	111.164.700,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.504.214,00
8	Pembulatan Gaji	26.821,00
9	Iuran Asuransi Kesehatan	-
10	Uang Paket	-
11	Tunjangan Panitia Musyawarah	-
12	Tunjangan Komisi	-
13	Tunjangan Panitia Anggaran	-
14	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	-
15	Tunjangan Perumahan	-
16	Uang Duka Wafat/Tewas	-
17	Uang Jasa Pengabdian	-
18	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian	-
19	Tunjangan Transportasi	-
20	Tunjangan Khusus PNS	-
Beban Tambahan Penghasilan PNS		1.406.186.700,00
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	-
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	-
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	-
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	-
5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	-
6	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.406.186.700,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah		-
1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		147.438.200,00
1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	147.438.200,00
2	Honorarium PNS	-
3	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-
4	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	-
5	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	-
6	Honorarium Pengelola Inventaris Barang	-
7	Honorarium Petugas Piket	-
8	Honorarium Kepanitiaan	-
Honorarium Non PNS		-
1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-
2	Honorarium pengurus organisasi/kelembagaan	-
3	Honorarium petugas piket	-
Uang Lembur		4.746.000,00
1	Uang Lembur PNS	4.746.000,00
2	Uang Lembur Non PNS	-
Jumlah Beban Pegawai		3.862.558.469,00

3.3.2.2. Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 2.359.583.042,00 dan Rp. 1.424.183.830,00. Naik sebesar Rp. 935.399.212,00 atau 65,68 % dari Tahun 2017.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan atau diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Persediaan	Jumlah (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis		178.761.850,00
1	Beban Alat Tulis Kantor	40.303.050,00
2	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-
3	Beban Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.817.300,00
4	Beban Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.121.000,00
5	Beban Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.514.500,00
6	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	580.000,00
7	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-
8	Beban Pengisian Tabung Gas	-
9	Beban Bahan dan Alat olah Raga	-
10	Beban Bahan dan Alat Keperluan Kantor	-
11	Beban Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	126.426.000,00
Beban Cetak dan Penggandaan		285.853.692,00
1	Beban Cetak	265.148.342,00
2	Beban Penggandaan	20.480.350,00
3	Beban Penjilidan	225.000,00
4	Beban Laminating	-
Beban Bahan/Material		234.409.000,00
1	Beban Bahan Baku Bangunan	16.409.000,00
2	Beban Bahan/Bibit Tanaman	-
3	Beban Bibit Ternak	-
4	Beban Bahan Obat-Obatan	-
5	Beban Bahan Kimia	-
6	Beban Persediaan Makanan Pokok	-
7	Beban Bahan Makanan Rumah Sakit (Pasien, Dokter Jaga dan Paramedis)	-
8	Beban Bahan Makanan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-
9	Beban Perlengkapan Rumah Dinas	-
10	Beban Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	214.250.000,00
11	Beban Bahan Praktek	-
12	Beban Bahan Pengumuman dan Sejenisnya	-
13	Beban Bahan Percontohan/ Alat Peraga/ Sampel	-
14	Beban Bahan Sarana Belajar Mengajar	-
15	Beban Bahan Jaringan dan Instalasi	-
16	Beban Bahan Radiologi	-
17	Beban Bahan dan Alat Rumah Tangga	-
18	Beban Bahan dan Alat Pertanian	-
19	Beban Pakan Ternak	-
20	Beban Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	3.750.000,00
21	Beban Bahan dan Alat Kesehatan	-

Beban Makanan dan Minuman		663.648.500,00
1	Beban Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	-
2	Beban Makanan Dan Minuman Rapat	50.487.500,00
3	Beban Makanan Dan Minuman Tamu	735.000,00
4	Beban Extra Fooding	-
5	Beban Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	611.346.000,00
6	Beban makanan dan Minuman Lembur	1.080.000,00
7	Beban Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Pasien	-
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		-
1	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-
2	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	-
3	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-
4	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-
5	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-
6	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-
7	Beban Kelengkapan pakaian Dinas	-
8	Beban Pakaian Dinas Lapangan	-
Beban Pakaian Kerja		-
1	Beban Pakaian Kerja Lapangan	-
2	Beban Pakaian Kerja Identitas	-
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		41.975.000,00
1	Beban Pakaian KORPRI	-
2	Beban Pakaian Adat Daerah	-
3	Beban Pakaian Batik Tradisional	6.750.000,00
4	Beban Pakaian Olahraga	35.225.000,00
5	Beban Pakaian Paskibra	-
6	Beban Pakaian Seragam Organisasi	-
7	Beban Kelengkapan Pakaian (Rompi dll)	-
8	Beban Pakaian Seragam Tim	-
Beban Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		954.935.000,00
1	Beban Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	954.935.000,00
2	Beban Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	-
3	Beban Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	-
Jumlah Beban Persediaan		2.359.583.042,00

3.3.2.3. Beban Jasa

Jumlah beban jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebesar Rp. 3.131.804.564,00 dan Rp. 2.816.574.092,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 315.230.472,00 atau 11,19 % dari Tahun 2017. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Jasa	Jumlah (Rp)
Honorarium PNS		202.229.000,00
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00
2	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	6.200.000,00
3	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	90.850.000,00
4	Honorarium Pengelola Inventaris Barang	-
5	Honorarium koordinator/ Operator	-
6	Honorarium Tim Angka Kredit	-
7	Honorarium PLT	-
8	Honorarium Petugas Piket	-
9	Honorarium Sidang Tim	70.799.000,00
10	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	9.480.000,00
11	Honorarium Kepanitiaan	3.150.000,00
Honorarium Non PNS		-
1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-
2	Honorarium pengurus organisasi/kelembagaan	-
3	Honorarium petugas piket	-
4	Intensif Penjaga Bendung, Petugas PMK dan Petugas Lainnya	-
5	Honorarium Petugas Laboratorium	-
Beban Jasa Kantor		2504.905.564,00
1	Beban Telepon	11.337.661,00
2	Beban Air	3.491.178,00
3	Beban Listrik	47.494.890,00
4	Beban Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	-
5	Beban Surat Kabar/Majalah	3.465.000,00
6	Beban Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	333.750,00
7	Beban Paket/Pengiriman	-
8	Beban Sertifikasi	-
9	Beban Jasa Transaksi Keuangan	-
10	Beban Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	189.050.000,00
11	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-
12	Beban Pajak Penerangan jalam Umum (PPJU)	-
13	Beban Air Time Radio Swasta	-
14	Beban jasa General Chek Up	-
15	Beban Uang saku kegiatan/rapat	410.865.000,00
16	Beban Retribusi Kebersihan kota	240.000,00
17	Beban Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	115.640.000,00
18	Beban Pajak Bumi dan Bangunan	1.693.625,00
19	Beban Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	454.575.000,00
20	Beban Jasa service dan Penggantian komponen	9.000.000,00
21	Beban Jasa Pengangkutan Barang	-
22	Beban Propaganda, Penerangan dan publikasi	63.332.000,00
23	Beban Pengurusan Perpanjangan Perizinan	-
24	Beban Perawatan alat Kesehatan dan Laboratorium	-
25	Beban Jasa Pelayanan umum	57.450.000,00
26	Beban Jasa Biro Perjalanan	-
27	Beban Jasa/Pengadaan/Pemeliharaan/Penyesuaian Sistem Aplikasi	-
28	Beban Iuran kepesertaan	-
29	Beban Penetapan NIP CPNS	-

30	Beban stimulan pembangunan	-
31	Beban Jasa Pihak Ketiga	635.042.960,00
32	Beban Jasa Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	71.250.000,00
33	Beban jasa hiburan/kesenian	430.644.500,00
34	Beban Pajak ABT	-
Beban Premi Asuransi		-
1	Beban Premi Asuransi Kesehatan dan geberal check up	-
2	Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah	-
3	Beban premi asuransi non PNS	-
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		66.300.000,00
1	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	-
2	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.500.000,00
3	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-
4	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	-
5	Beban sewa Penginapan dan Akomodasi	38.700.000,00
6	Beban Sewa Tanah	-
7	Beban Sewa panggung/Stan	13.100.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas		77.150.000,00
1	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	77.150.000,00
2	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	-
3	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	-
Beban Sewa Alat Berat		-
1	Beban Sewa Eskavator	-
2	Beban Sewa Buldoser	-
3	Sewa alat-alat berat	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		163.970.000,00
1	Beban Sewa Meja Kursi	15.570.000,00
2	Beban Sewa Komputer dan Printer	-
3	Beban Sewa Proyektor	-
4	Beban Sewa Generator	-
5	Beban Sewa Tenda	28.150.000,00
6	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	37.200.000,00
7	Beban sewa alat Elektronik	79.050.000,00
8	Beban Sewa Alat Rumah tangga	-
9	Beban Sewa Atap-alat Tradisional	4.000.000,00
10	Beban Sewa Peralatan/Perlengkapan SAR	-
11	Beban Sewa alat-alat Sarana perlengkapan olahraga	-
12	Beban Sewa Peralatan Praktek	-
Beban Beasiswa Pendidikan PNS		-
1	Beban Beasiswa Tugas Belajar D3	-
2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	-
3	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	-
4	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	-
5	Beban Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	-
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS		-
1	Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	-
2	Beban Sosialisasi	-
3	Beban Bimbingan Teknis	-
4	Beban Seminar, lokakarya	-

Beban Jasa Konsultansi		-
1	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	-
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	-
3	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	-
Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga		109.000.000,00
1	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	109.000.000,00
2	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	-
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		-
1	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	-
2	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	-
Beban Barang dan Jasa Ekstrakomptabel		8250000
1	Beban Barang dan Jasa Ekstrakomptabel	8250000
Jumlah Beban Jasa		3.131.804.564,00

3.3.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 69.748.192,00 dan Rp. 49.824.128,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.924.064,00 atau sebesar 39,99 % dari Tahun 2017.

Beban Pemeliharaan adalah merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Jumlah (Rp)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		60.110.192,00
1	Beban Jasa Service	7.832.000,00
2	Beban Penggantian Suku Cadang	24.796.000,00
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.383.567,00
4	Beban Jasa KIR	-
5	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.098.625,00
6	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-
7	Beban Administrasi Kendaraan	-
8	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	-
9	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	-
Beban Pemeliharaan		9.638.000,00
1	Beban Pemeliharaan Jalan	-
2	Beban Pemeliharaan Jembatan	-
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung	9.638.000,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Lainnya	-
5	Beban Pemeliharaan Peralatan	-
6	Beban Pemeliharaan Kendaraan dinas/Operasional	-
Jumlah Beban Pemeliharaan		69.748.192,00

3.3.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 512.102.737,00 dan Rp. 338.733.490,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 173.369.247,00 atau sebesar 51,18 % dari Tahun 2017.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Perjalanan Dinas	Jumlah (Rp)
Beban Perjalanan Dinas		512.102.737,00
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.440.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	469.662.737,00
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-
Beban Perjalanan Pindah Tugas		-
1	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	-
2	Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		512.102.737,00

3.3.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 635.016.828,00 dan Rp. 590.261.894,90, mengalami kenaikan sebesar Rp. 44.754.934,00 atau sebesar 7,58 % dari Tahun 2017.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Rincian beban penyusutan dan amortisasi untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Jumlah (Rp)
1	Beban penyusutan peralatan dan mesin	194.044.109,00
2	Beban penyusutan gedung dan bangunan	252.252.478,00
3	Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	188.278.157,00
4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	442.084,90
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		635.016.828,90

3.3.2.7. Beban Penyisihan Piutang

Jumlah beban penyisihan piutang untuk Tahun 2018 tidak ada namun pada Tahun 2017 terdapat beban penyisihan piutang sebesar Rp. 6.892.000,00.

3.3.3. Kegiatan Non Operasional

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat defisit non operasional yang berasal dari penjualan aset non lancer sebesar Rp. 263.837.013,00, sedangkan pada Tahun 2017 tidak terdapat surplus/defisit non operasional.

3.3.4. Pos Luar Biasa

Pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak terdapat pendapatan maupun beban luar biasa.

3.3.5. Surplus/Defisit LO

Realisasi surplus/defisit-LO Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. -5.839.344.245,90. Apabila dibandingkan dengan realisasi surplus/defisit-LO Tahun 2017 sebesar Rp. 4.889.473.877,90, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. -949.870.368,00 atau 19,43 %.

3.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018 menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas selama Tahun Anggaran 2018. Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 40.389.923.635,50 berasal dari saldo awal ekuitas per Desember 2017 sebesar Rp. 25.690.077.245,40 ditambah surplus/defisit-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. -5.839.344.245,90 ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 108.547.330,00

3.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 25.690.077.245,40 berasal dari saldo ekuitas neraca peer 31 Desember 2017 setelah audit.

3.4.2. Surplus Defisit LO Tahun Anggaran 2018

Surplus/defisit-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. -5.839.344.245,90 berasal dari Pendapatan-LO dikurangi Beban Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dapat dilihat pada laporan operasional.

3.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan atas ekuitas awal sebesar Rp. 108.547.330,00 yang terdiri dari koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 97.999.330,00 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 10.548.000,00.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam tahun anggaran 2018 serta realisasi tahun anggaran sebelumnya, posisi kekayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 (satu) periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penjelasan yang memadai sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018.

Wonosobo, 15 Februari 2019
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Drs. One Andang Wardoyo, M.Si.
NIP. 19680925 198803 1 003

LAMPIRAN